

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi ialah suatu usaha untuk menurunkan kemiskinan, menuntaskan ketimpangan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Dahulu hanya pemerintah yang berperan aktif dalam pembangunan sedangkan masyarakat berperan sebagai objek yang dianggap pasif dalam pembangunan (Rifky, 2018). Namun, paradigma yang berkembang belakangan ini yaitu pembangunan ekonomi melalui standar pembangunan manusia (human development), dimana masyarakat tidak lagi berperan sebagai objek yang dianggap pasif tetapi juga sudah memiliki peran aktif dalam pembangunan. Tujuan perubahan paradigma yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat secara totalitas serta berkepanjangan. Tujuan akhir pembangunan ialah menambah kemakmuran masyarakat serta memberikan kehidupan yang layak secara materi dan juga non materi.

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya maknanya pembangunan dilaksanakan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat agar dapat berumur panjang serta menjalankan hidup dengan produktif dan sehat. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang banyak, tapi sayangnyanya belum bisa di manfaatkan dengan baik dari dulu sampai saat ini, hal tersebut dikarenakan rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengelola

dan memanfaatkan kekayaan alam yang di sediakan oleh tuhan, sehingga Indonesia hanya mampu menjual barang mentah ke negara lain dengan mendapatkan harga yang murah. Padahal apabila masyarakat Indonesia mampu mengelola SDA dengan baik maka Indonesia dapat mengimpor barang jadi dengan harga yang tentunya lebih mahal.

SDM ialah aset utama bagi suatu negara. SDA hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif, akan tetapi SDM bersifat aktif yang akan mengelola sumber daya alam guna mewujudkan pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan pembangunan perlu ditingkatkan komponen indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai ciri talenta berkualitas tinggi sebagai sarana penting pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Terdapat 3 pasal tentang pembangunan manusia yang perlu dibenahi, yaitu: Pertama, banyak negara berkembang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi tidak diikuti dengan berkurangnya kesenjangan sosial-ekonomi serta kemiskinan termasuk Indonesia. Kedua, ada negara maju berpenghasilan tinggi belum berhasil menyurutkan masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba, AIDS, alkoholisme, tunawisma serta KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Ketiga, ada negara-negara berpenghasilan rendah dapat mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mereka dapat memanfaatkan seluruh sumber daya secara bijaksana dalam meningkatkan kompetensi dasar manusia (UNDP, 1990). IPM adalah salah satu pilar Sustainable Development Goals (SDGs) yang dipublikasikan oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak memasuki tahun 2016 hingga 2030 sebagai pengganti Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015. SDGs bersifat global-term, program untuk memaksimalkan semua sumber daya yang ada di setiap negara termasuk SDM. Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia dan 192 negara lainnya berpartisipasi dalam mengadopsi SDGs sebagai program pembangunan berkelanjutan. Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan berkomitmen untuk menyelesaikan SDGs.

Tujuan yang terkandung dalam SDGs ialah pada tujuan ke-3 (kesehatan yang baik dan kesejahteraan), tujuan ke-4 (pendidikan berkualitas) dan tujuan ke-8 (pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak) sama dengan dimensi dalam IPM yang di bangun oleh United Nation Development Program (UNDP) berlandaskan gagasan Haq yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi/standar hidup layak. Kesehatan diukur oleh angka harapan hidup, pendidikan di ukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta dimensi ekonomi/standar hidup layak di ukur dengan kemampuan daya beli. Akan tetapi sekarang indikator angka melek huruf telah ubah menjadi harapan lama sekolah sebab angka melek huruf di berbagai daerah di Indonesia sudah tinggi sehingga tidak bisa lagi menggambarkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (BPS, 2020) .

Di Indonesia angka harapan hidup, harapan lama sekolah serta rata – rata lama sekolah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pengeluaran perkapita juga ikut naik di setiap tahun namun di tahun 2020 angka tersebut mengalami penurunan

dari 11,29 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 11,01 juta rupiah pada tahun 2020, berdasarkan informasi yang di dapat dari BPS hal tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19.

**Tabel 1. 1**

**Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010 - 2020**

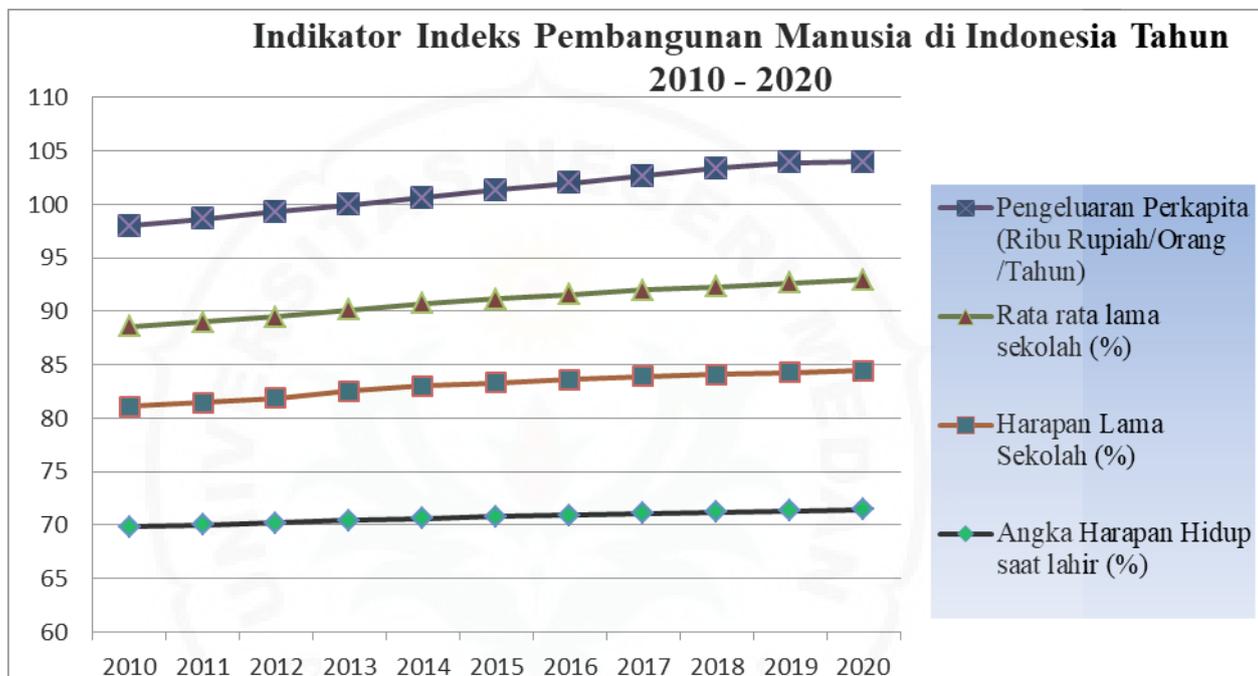
Tahun	Angka Harapan Hidup saat lahir	Harapan Lama Sekolah	Rata rata lama sekolah	Pengeluaran Perkapita (Rupiah)
2010	69.81	11.29	7.46	9 437
2011	70.01	11.44	7.52	9 647
2012	70.20	11.68	7.59	9 815
2013	70.40	12.10	7.61	9 858
2014	70.59	12.39	7.73	9 903
2015	70.78	12.55	7.84	10 150
2016	70.90	12.72	7.95	10 420
2017	71.06	12.85	8.10	10 664
2018	71.20	12.91	8.17	11 059
2019	71.34	12.95	8.34	11 299
2020	71.47	12.98	8.48	11 013

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2020*

Agar lebih jelasnya dapat dilihat bagaimana perkembangan setiap indikator pada grafik 1.1 di bawah ini.

Gambar 1. 1

## Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2020

Indikator penting bagi kemajuan suatu negara adalah pembangunan manusia, negara yang maju tidak semata – mata hanya berdasarkan pada PDB yang tinggi tetapi juga mencakup kesejahteraan seluruh rakyatnya termasuk harapan hidup dan pendidikannya. Hal tersebut searah dengan paradigma yang dikembangkan di tahun 90-an, yaitu pembangunan manusia.

IPM dipakai dalam mengukur perkembangan SDM di negara atau wilayah. Norwegia saat ini memiliki IPM tertinggi dengan 0.958 kategori sangat tinggi. menurut peringkat indeks pembangunan manusia 2020, berikut sepuluh negara yang memiliki IPM tertinggi antara lain: 1) Norwegia, 2) Swiss, 3) Irlandia, 4) Jerman, 5)

Hongkong, 6) Australia, 7) Islandia, 8) Swedia, 9) Singapura, dan 10) Belanda. Indonesia masuk kategori tinggi, yakni 0.718 dan berada pada peringkat 107 dunia. Di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 6. Berikut merupakan tabel peringkat IPM di ASEAN pada tahun 2020.

**Tabel 1. 2**

**Peringkat Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN 2020**

Peringkat ASEAN	Peringkat Global	Negara	IPM
1	11	Singapura	0.938
2	47	Brunei Darussalam	0.838
3	62	Malaysia	0.810
4	79	Thailand	0.777
5	107	Filipina	0.718
6	107	Indonesia	0.718
7	117	Vietnam	0.704
8	137	Laos	0.613
9	144	Kamboja	0.594
10	147	Myanmar	0.583

*Sumber: UNDP Human Development Index Ranking. 2020*

Secara konseptual, pembangunan manusia ialah sebuah usaha yang dilakukan agar dapat memperluas kesempatan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup layak, yang umumnya dapat dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli, untuk meningkatkan produktivitas penduduk maka sangat diperlukan pengetahuan dan kesehatan yang memadai. Ranah pembangunan manusia melalui bidang pendidikan juga diperhatikan, karena dengan mengikuti pendidikan manusia akan mengalami suatu proses. Manusia menggunakan proses ini

untuk menambah pengetahuan, kemampuan/keterampilan, meningkatkan kreativitas atau inovasi, yang semuanya bisa meningkatkan derajat tiap-tiap orang. Pendidikan dipandang sebagai investasi untuk menuai hasilnya di kemudian hari. Jika mutu SDM rendah, mencerminkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga akan mempengaruhi pembangunan manusia. Konsisten dengan pandangan Schultz yang percaya bahwa, pengetahuan serta keterampilan ialah bentuk modal yang mengarah pada "investasi yang disengaja". Investasi dalam bentuk pendidikan formal, pelatihan, dan kesehatan akan menambah peluang dan pilihan pribadi, sehingga meningkatkan kemampuan untuk terlibat dalam pekerjaan yang produktif (Astri et al., 2013).

Menurut Meier dan Rauch (2002) pendidikan ialah modal manusia yang tentu memberikan kontribusi untuk IPM, karena pendidikan merupakan wujud investasi untuk pengumpulan modal manusia serta pertumbuhan output total. Kesehatan adalah inti kesejahteraan serta pendidikan ialah faktor terpenting dalam mencapai kehidupana yang makmur (Septiana dkk, 2015).

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan IPM, karena apabila bertambah banyak siswa yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, maka bertambah besar pula harapan memperoleh pekerjaan dan menguasai keterampilan, sehingga meningkatkan produktivitas serta mengurangi pengangguran dan mengembangkan masyarakat agar semakin sejahtera, pemerintah sendiri nampaknya serius dalam menangani masalah pendidikan dan kesehatan di

Indonesia hal tersebut tercermin dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 20% dari APBN. Hal tersebut diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 49 mengatur bahwa dana pendidikan dialokasikan paling sedikit 20% dari APBN untuk bidang pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dan minimal 20% dari APBD. namun dari Amandemen UUD 1945 dikatakan bahwa 20% dari anggaran tersebut digunakan termasuk untuk gaji tenaga pendidik. Serta untuk kesehatan UU RI No 36 tahun 2009 mengatakan anggaran pemerintah pusat harus dialokasikan sedikitnya 5% dari APBN untuk sektor kesehatan tidak termasuk gaji, anggaran daerah setidaknya 10% dari APBD diluar gaji. Berikut merupakan realisasi APBN untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

**Tabel 1. 3**

**Realisasi Anggaran APBN Untuk Sektor Pendidikan**

Tahun	APBN (Triliun)	Rasio Anggaran Pendidikan (%)	Rasio Anggaran Kesehatan (%)
2010	1.042.117,2	20,8	2,9
2011	1.294.999,1	19,9	2,8
2012	1.491.410,2	19,9	2,7
2013	1.650.563,7	20,1	2,8
2014	1.767.317,1	19,9	3,4
2015	1.796.618,4	21,7	3,9
2016	1.864.275,1	19,8	5,0
2017	2.004.076,0	20,2	4,6
2018	2.213.117,8	19,5	4,9
2019	2.304.268,6	19,9	4,9
2020	2.593.534,9	18,2	6,6

*Sumber : Kementerian Keuangan 2022*

Dapat dilihat pada tabel 1.3 bahwa alokasi APBN untuk bidang pendidikan dan kesehatan mengalami fluktuasi setiap tahun dan hal tersebut melanggar ketentuan yang telah ditetapkan yaitu anggaran sektor pendidikan 20% dan anggaran untuk sektor kesehatan 5% dari APBN namun meskipun demikian pada umumnya kualitas manusia Indonesia yang diukur dengan IPM tampaknya terus meningkat setiap tahun, dapat dilihat dari tabel 1.4.

**Tabel 1. 4**

**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia Tahun 2010 - 2020**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Milyar)	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Milyar)	IPM (%)
2010	216.721.9	29.893.5	66.53
2011	258.347.2	36.094.0	67.09
2012	297.365.1	40.618.9	67.70
2013	332.184.1	46.308.4	68.31
2014	353.388.1	59.585.0	68.90
2015	390.279.0	69.331.6	69.55
2016	370.810.2	92.758.6	70.18
2017	406.102.0	92.166.0	70.81
2018	431.733.8	109.037.2	71.39
2019	460.316.8	113.619.6	71.92
2020	473.658.8	172.254.7	71.94

*Sumber : Kementerian Keuangan dan Badan Pusat statistik (BPS) 2020.*

Tabel 1.4 menunjukkan IPM mengalami peningkatan pada setiap tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai IPM di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 71.94% dimana angka tersebut masuk ke dalam kategori tinggi. Pada tahun 2020 IPM di Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya, IPM pada tahun 2020 hanya tumbuh 0.03% (meningkat 0.02 poin) dibandingkan dari tahun sebelumnya dan berdasarkan informasi dari website BPS hal tersebut karena pandemic Covid-19 yang membawa dampak buruk terhadap pembanguna manusia di Indonesia.

Dari tabel dapat dilihat untuk pengeluaran publik sektor pendidikan dan kesehatan terjadi kenaikan di setiap tahunnya namun pada tahun 2016 pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami penurunan dan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan juga mengalami penurunan pada tahun 2017, namun walaupun terjadi penurunan pengeluaran pada kedua sektor tersebut IPM di Indonesia tetap mengalami peningkatan pada tahun 2016 saat pengeluaran pemerintah sektor pendidikan turun IPM mengalami pertumbuhan sebesar 0,91% dan pada tahun 2017 saat pengeluaran pemerintah sektor kesehatan turun, IPM di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 0,90% Hal ini mematahkan teori Widodo et al (2012) bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan sektor yang terkait dengan upaya peningkatan peluang penduduk dalam meraih kehidupan yang lebih layak, yaitu melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Namun nyatanya, meski ada pengurangan belanja pemerintah untuk pendidikan serta kesehatan, data IPM di Indonesia terus meningkat.

Dari landasan teori, penulis memilih topik penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2010 – 2020.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang maka teridentifikasi masalah, diantaranya:

1. Pengeluaran perkapita mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
2. Di tahun 2020 pertumbuhan IPM menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Peningkatan IPM tidak sejalan dengan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan
4. Peningkatan IPM tidak sejalan dengan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan.

## **1.3 Batasan Masalah**

Dari latar belakang serta identifikasi masalah, penulis perlu membatasi masalah agar uraian judul penelitian ini tidak keliru, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut::

1. Objek yang dipilih adalah IPM di Indonesia dari tahun 2010-2020.
2. Penelitian terbatas pada IPM di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini dikomfirmasi, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Indonesia secara simultan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi serta memahami pengaruh dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap IPM di Indonesia.
2. Mengidentifikasi serta memahami pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap IPM di Indonesia.
3. Mengidentifikasi pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan terhadap IPM di Indonesia.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua pihak, diantaranya:

1. Untuk Penulis

Bagi penulis bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis permasalahan dengan menggunakan teori

yang sudah ada. Serta diharapkan dapat menyajikan bukti empiris pengaruh dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM.

2. Untuk pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan ekonomi sehingga dapat menambah mutu SDM.

3. Untuk akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman sekaligus informasi bagi peneliti selanjutnya terkhususnya di bidang yang sama.

4. Untuk Pembaca dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan bagi para pembaca dan masyarakat serta diharapkan keikutsertaan untuk mengembagkan sektor-sektor ekonomi yang mempengaruhi IPM.